PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 36 TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA DAERAH (BPBD) TAHUN 2027

Sarilamak, 30 September 2026



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2027 adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan Daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2027 dimaksudkan untuk menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2027 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2027 disusun bertujuan untuk :

a. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
b. acuan dalam penyusunan rencana anggaran PD tahun 2027.

Pasal 4

(1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2027 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2027 dan rencana strategis PD.
(2) Renja PD tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Renja PD Tahun 2027 disusun dengan sistematika:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
    c. bab III memuat tujuan dan sasaran PD;
    d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD;
    e. bab V memuat kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
    f. bab VI memuat penutup.
(2) Renja PD Tahun 2027 terdiri dari:
    a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
    b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
    d. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
    e. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
    f. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    g. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    h. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
    i. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
    j. Rencana Kerja Dinas Sosial;
    k. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    l. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    m. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
    o. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
    p. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
    q. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
    r. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
    s. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
    t. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    u. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
    v. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
    w. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
    x. Rencana Kerja Dinas Pangan;
    y. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
    z. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

aa. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
bb. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
cc. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
dd. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
ee. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
ff. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
gg. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
hh. Rencana Kerja Kecamatan Guguak;
ii. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
jj. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
kk. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
ll. Rencana Kerja Kecamaan Luak;
mm. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
nn. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
oo. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
pp. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
qq. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

(3) Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(4) Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(5) Rencana Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(6) Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(7) Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(8) Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(9) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(10) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(11) Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(12) Rencana Kera Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(13) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(14) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(15) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(16) Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(17) Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(18) Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(19) Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(20) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(21) Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(22) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(23) Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(24) Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(25) Rencana Kerja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(26) Rencana Kerja Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(27) Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(28) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z

tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(29) Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(30) Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ab tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(31) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ac tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(32) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ad tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(33) Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ae tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(34) Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf af tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(35) Rencana Kerja Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ag tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(36) Rencana Kerja Kecamatan Guguak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(37) Rencana Kerja Kecamatan Mungka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ai tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(38) Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(39) Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ak tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(40) Rencana Kerja Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf al tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(41) Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf am tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(42) Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf an tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(43) Rencana Kerja Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ao tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(44) Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ap tercantum dalam Lampiran XLII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(45) Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2027 dilakukan oleh masing-masing kepala PD.

Pasal 7

(1) Perubahan Renja PD Tahun 2027 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

(2) Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2027 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 September 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 30 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026 NOMOR 36

DAFTAR ISI

		Halaman
DAFTAR ISI		
DAFTAR TABEL		
DAFTAR GAMBAR		
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	7
	1.3 Maksud dan Tujuan	8
	1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
	2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	16
	2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
	3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional	21
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	22
	3.3 Program dan Kegiatan	23
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
BAB V	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
	5.1 Indikator Kinerja Utama	60
	5.2 Indikator Kinerja Kunci	60
BAB VI	PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kalender Rencana Penyusunan Renja BPBD Tahun 2027	3
Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD dan Pencapaian Renstra BPBD s/d Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota	10
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota	14
Tabel 2.3.	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Kabupaten Lima Puluh Kota	17
Tabel 2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027	20
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD pada Tahun 2025-2030	23
Tabel 3.2.	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan BPBD	23
Tabel 3.3.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Pendukungan Prioritas Kabupaten	37
Tabel 3.4.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPBD Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Lima Puluh Kota	28
Tabel 4.1.	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2027	35
Tabel 4.2.	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027	59
Tabel 5.1.	Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2025-2030	60
Tabel 5.2.	Indikator Kinerja Kunci BPBD Tahun 2025-2030	60

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2027 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Sesuai amanat tersebut maka BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2027 ini menyusun Rencana Kerja BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2027, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2027 yang telah ditetapkan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

Adapun tahapan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

I. Persiapan penyusunan;
II. Penyusunan rancangan awal;
III. Penyusunan rancangan;
IV. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas PD;
V. Perumusan rancangan akhir;
VI. Penetapan.

I. Persiapan Penyusunan Renja BPBD, dilaksanakan sebagai berikut;

1. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 000.8.2.4/247/BUP-LK/XII/20256 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka diadakan orientasi penyusunan Rencana Kerja BPBD yang melibatkan seluruh Kepala Bagian yang terkait dengan perencanaan pada Bagian masing-masing. Orientasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar sesama anggota tim dalam hal tata cara, kaidah serta jadwal Penyusunan Rencana Kerja.
2. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.

II. Penyusunan Rancangan Awal Renja;

Sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Puluh Kota Nomor 000.7.2.4/261/5/BPBDda- LK/III/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

a. Pendahuluan;
b. Hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dan;
e. Penutup

Berikut adalah Tabel Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017:

Tabel 1.1

Kalender Rencana Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Jenis/TahapanKegiatan	2025								2026																															
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	Persiapan Penyusunan Renja 2027																																								
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																								
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																								
3	Orientasi Mengenai Renja PD																																								
4	Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan SIPD																																								
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2027																																								
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2027 berdasarkan Ranwal RKPD dan Renstra PD																																								
2	Penyampaian Rancangan Awal Renja BPBD kepada Bappelitbangda untuk Diverifikasi																																								
3	Verifikasi Ranwal Renja BPBD oleh Bappelitbangda untuk Menjamin bahwa Rancangan																																								

No	Jenis/Tahapan Kegiatan	2025								2026																											
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
D	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD																																						
1	Pelaksanaan Forum BPBD yang Dihadiri oleh Pemangku Kepentingan yang Memiliki Keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi BPBD Bertujuan untuk Memperoleh Masukan dalam Rangka Penajaman Target Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalamRancangan Renja BPBD																																						
E	Perumusan Rancangan Akhir Renja 2027																																						
1	Penyempurnaan Rancangan Senja menjadi Rancangan Akhir Renja Berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan Mempertajam Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif BPBD Berdasarkan Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif yang Ditetapkan di dalam Perkada RKPD																																						

No	Jenis/Tahapan Kegiatan	2025								2026																													
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Penyampaian Rancangan Akhir Renja BBD kepada Bappelitbangda untuk Diverifikasi																																						
3	Verifikasi Rancangan Akhir Renja BPBD oleh Bappelitbangda untuk Menjamin bahwa Rancangan Akhir Renja BPBD Sudah Selaras dengan Perbup RKPD																																						
F	Penetapan Renja PD 2027																																						
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja Semua PD oleh Bappelitbangda kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk Selanjutnya Ditetapkan dengan Perkada																																						
2	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD Se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Bappelitbangda																																						

III. Penyusunan Rencana Kerja;

Penyusunan Rencana Kerja BPBD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja BPBD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja PD. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan kepada Kepala BPBD untuk diverifikasi oleh tim sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi RKPD. Rancangan Renja ini disampaikan ke BPBD paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2026.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

Berdasarkan hasil koordinasi BPBD dan OPD, maka demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan secara gabungan yang diatur oleh BPBD, dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah BPBD dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2026 di Kantor BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder) baik secara luring (Offline) maupun daring (Online);

V. Perumusan Rencana Akhir Renja;

Perumusan Rencana Akhir Renja BPBD merupakan proses penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Hal ini dilaksanakan pada bulan Juli 2026 yang dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

VI. Penetapan.

Penetapan Renja Perangkat Daerah merupakan tahap akhir dalam penyusunan rancangan akhir Renja BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 disampaikan ke BPBD untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat satu minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi dan disempurnakan kembali oleh BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Rancangan akhir Renja diserahkan kembali ke BPBD untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (Lembar Negara Tahun 2022 No 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 965);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018 Nomor 88);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 Nomor 21).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota 2027 dimaksudkan untuk mampu menjawab tuntutan lingkungan yang berkenaan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, pemenuhan kebutuhan logistik serta penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sehingga mampu dan eksis dalam rangka meningkatkan kinerja yang profesional.

Tujuan penyusunan Renja BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota 2027 adalah:

1. Memberikan pedoman pada sekretariat, bidang, sub

bagian, seksi dan staf BPBD dalam penyusunan perencanaan, penentuan skala prioritas program dan kegiatan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun mendatang.

2. Mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Bupati di Bidang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menjamin tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya yang ada.
4. Membangun sistem akuntabilitas kinerja BPBD sebagai salah satu institusi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Penanggulangan Bencana.
5. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 129 disajikan sebagai berikut:

a. Pendahuluan;
   Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja BPBD, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.
b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
   Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra BPBD, analisis kinerja pelayanan BPBD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD dan sebagainya.
c. Tujuan dan Sasaran;
   Memuat tujuan dan sasaran Renja BPBD Tahun 2027 dan arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.
d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
   Menguraikan Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
e. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
   Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra BPBD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja BPBD Tahun 2025.
f. Penutup
   Berisi ketentuan penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun 2025 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2026 (tahun n-1), dengan mengacu pada APBD tahun 2025 yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja BPBD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPBD Tahun 2025-2029 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja BPBD tahun-tahun sebelumnya.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun 2025 dan realisasi Renstra BPBD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BPBD dan realisasi APBD. Dari hasil reviu yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan kondisi di atas, pada bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tercapainya, tidak tercapainya, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BPBD. Di samping itu, juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun hasil reviu terhadap evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra BPBD, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD dan Pencapaian Renstra BPBD sampai dengan Tahun 2025 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD dan Pencapaian Renstra BPBD s/d tahun 2026
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah: BPBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2026)	
					Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d tahun berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	43	43	100	81	81

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2026)	
					Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d tahun berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 05 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Perencanaan dan Evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	83	83	100	94	94
1 05 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	73	73	100	91	91
1 05 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertatanya administrasi kepegawaian, kelengkapan dan peningkatan kapasitas aparatur	100	100	100	0	0	100	67	67
1 05 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	49	49	100	83	83
1 05 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	0	0	100	67	67
1 05 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	44	44	100	81	81
1 05 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	50	50	100	83	83
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pemenuhan terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana	100	100	100	92	92	100	97	97
1 05 03 2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100
1 05 03 2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	100	100	43	43	100	81	81
1 05 03 2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100	200	200	100	133	133
1 05 03 2.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	100	100	25	25	100	75	75

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi Renja tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Program dan/atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:

1. Program Penanggulangan Bencana, kegiatan program ini telah mencapai target capaian, yaitu:

   a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota. Target pencapaian kegiatan ini sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% dengan tingkat realisasi 100%.

   b. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Target pencapaian kegiatan ini sebesar 100%, terealisasi sebesar 200% dengan tingkat realisasi 200%.

   Program dan kegiatan yang telah mencapai target ini telah direncanakan secara matang dan dilaksanakan sesuai tahapan serta jadwal yang ditetapkan, serta didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai dan tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal. Capaian ini memberikan implikasi positif terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Renstra BPBD, sekaligus menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberhasilan tersebut menjadi dasar penguatan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya melalui kebijakan mempertahankan konsistensi perencanaan dan penganggaran, peningkatan efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar capaian kinerja dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian target Renstra secara keseluruhan.

II. Program dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan program ini tidak mencapai target capaian, yaitu:

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100% dari 2 sub kegiatan, terealisasi 1 sub kegiatan dengan tingkat realisasi sebesar 83%.

   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dengan target 100% dari 3 sub kegiatan, terealisasi 2 sub kegiatan dengan tingkat realisasi sebesar 73%.

   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100% dari 1 sub kegiatan, terealisasi 0 sub kegiatan dengan tingkat realisasi sebesar 0%.

   d. Kegiatan Administrasi Umum Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100% dari 6 sub kegiatan, terealisasi 4 sub kegiatan dengan tingkat realisasi sebesar 49%.

   e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% dari 2 sub kegiatan, terealisasi 0 sub kegiatan dengan tingkat realisasi sebesar 0%.

   f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% dari 3 sub kegiatan, terealisasi 3

sub kegiatan dengan tingkat realisasi sebesar 44%.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% dari 2 sub kegiatan, terealisasi 2 sub kegiatan dengan tingkat realisasi sebesar 50%.

2. Program Penanggulangan Bencana, kegiatan program ini tidak mencapai target capaian, yaitu:

   a. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan target 100% dari 4 sub kegiatan, terealisasi 4 sub kegiatan dengan tingkat realisasi sebesar 43%.

   b. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan target 100% dari 1 sub kegiatan, terealisasi 1 sub kegiatan dengan tingkat realisasi sebesar 25%.

   Tidak tercapainya target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Penanggulangan Bencana, disebabkan karena adanya *refocusing* anggaran yang mempengaruhi penyesuaian program dan prioritas yang dilaksanakan. Hal ini memberikan implikasi terhadap pencapaian target Renstra BPBD.

   Untuk mengatasi hal tersebut, kebijakan dan tindakan yang dilakukan melalui penyesuaian kembali prioritas kegiatan penunjang dalam dokumen perencanaan tahunan, optimalisasi anggaran yang tersedia melalui efisiensi dan realokasi pada kegiatan yang bersifat mendesak, serta perencanaan secara lebih terukur agar dapat dilaksanakan secara bertahap pada tahun berikutnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota serta PERMENDAGRI Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota berperan dalam hal memimpin, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sebagai upaya pengurangan resiko bencana serta penyiapan pelatihan, sarana prasarana serta dukungan logistik untuk kesiapsiagaan dan kemungkinan terjadinya bencana dalam berbagai sektor pembangunan sesuai agenda pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2029.

Kedaruratan dan logistik diarahkan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dalam hal tindakan koordinasi penyelamatan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan keamanan saat terjadi bencana di lokasi terjadinya bencana serta penyiapan dukungan logistik untuk kejadian bencana.

Rehabilitasi dan rekonstruksi diarahkan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi, pengendalian evaluasi rehabilitasi akibat bencana dan rekonstruksi, pengendalian, serta evaluasi kegiatan rekonstruksi akibat bencana.

Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan SPM Sub Urusan Bencana (tabel 2.2) serta tugas dan fungsi BPBD berdasarkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra BPBD 2025-2029 ditampilkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD
Kabupaten Lima Puluh Koota

No	Indikator	SPM	IKK/ IKD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Risiko Bencana Daerah	✓	IKD	119,2	119,19-118,92	118,91-118,64	118,63-118,36	197,52	Belum tersedia	187,64	177,36	Naiknya nilai indeks IRB disebabkan oleh belum terealisasinya dokumen KRB menjadi Perbup.
2	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana.	✓	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	Belum tersedia	100%	100%	Meningkanya cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana
3	Persentase Penanganan tanggap Darurat Bencana	✓	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	Belum tersedia	100%	100%	Terpenuhinya Penanganan tanggap Darurat Bencana
4	Persentase Penanganan Pasca Bencana	✓	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	Belum tersedia	100%	100%	Terpenuhinya Penanganan Pasca Bencana

Capaian yang diraih oleh BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Pelayanan informasi rawan bencana Kab, Lima Puluh Kota tahun 2023 dapat tercapai 100% yaitu informasi kebencanaan telah disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi tatap muka, melalui media radio, surat edaran, papan informasi, dan mediasosial (Whatsapp, FB, Instagram);
2. Terlaksananya seluruh kegiatan Penanganan tanggap Darurat Bencana tahun 2025;
3. Terlaksananya seluruh kegiatan Penanganan Pasca Bencana pada tahun 2025.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan BPBD dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan BPBD terhadap *stakeholders*.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD.
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan ketertiban umum ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat.
5. Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2027.

Tingkat kinerja pelayanan BPBD sangat bergantung pada efektivitas respons terhadap bencana, koordinasi antar lembaga, dan kecepatan distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Secara umum, BPBD berperan penting dalam merespons bencana alam dengan cepat, mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan pasca-bencana. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan dalam optimalisasi kinerja BPBD, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya fasilitas dan peralatan yang memadai, serta tantangan geografis dan komunikasi yang bisa menghambat respons cepat.

Beberapa hal kritis terkait pelayanan BPBD antara lain:

1. Penyebaran dan Aksesibilitas Informasi.
   Informasi terkait kondisi bencana sering kali terlambat sampai ke masyarakat atau pihak yang berwenang. Hal ini bisa menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lambatnya proses evakuasi atau distribusi bantuan.
2. Koordinasi Antar Lembaga.
   Ketidakterpaduan dalam koordinasi antara BPBD, TNI, Polri, serta organisasi lainnya sering kali menjadi kendala dalam penanggulangan bencana, sehingga menghambat kelancaran respons dan distribusi bantuan.
3. Kesiapan Logistik dan Infrastruktur.
   Persoalan distribusi bantuan dan infrastruktur yang rusak akibat bencana sering menjadi kendala dalam pelayanan BPBD. Keterbatasan transportasi atau rusaknya jalan dapat memperlambat pengiriman barang bantuan ke lokasi yang terdampak.

Untuk meningkatkan kinerja BPBD, perlu ada pembenahan pada aspek ini, seperti pelatihan berkelanjutan untuk SDM, pemanfaatan teknologi dalam penyebaran informasi, serta peningkatan kapasitas dan dukungan logistik di wilayah rawan bencana.

Adapun Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah antara lain dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan tantangan kebencanaan dimasa datang yang akan semakin kompleks, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya. Hambatan dan persoalan di atas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tahun 2025-2029. BPBD merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi ke 6 (enam) yaitu meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan.

Merunut pada permasalahan yang ada, untuk meningkatkan kinerja BPBD dimasa mendatang, tantangan yang dihadapi beberapa tahun mendatang adalah:

1. Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (*global warming*).
2. Belum terpadunya program penanggulangan bencana secara lintas sektor.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan penanggulangan bencana.
4. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana.

Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak, namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja BPBD, yaitu :

1. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan bencana.
2. Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif.
3. Kepedulian lintas sektor untuk mengalokasikan dalam program-program kebencanaan.

Berdasarkan pemetaan masalah ditetapkan 2 hal yang menjadi isu strategis dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

1. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam Pengurangan resiko bencana.
2. Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan sumber daya dalam penanggulangan bencana.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya reviu terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja BPBD dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja BPBD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja BPBD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Perbandingan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan renja BPBD dapat dilihat melalui tabel 2.3 di bawah.

Tabel 2.3
Reviu Terhadap rancangan Awal RKPD 2027
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan terhadap pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	9.566.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan terhadap pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	47%	4.471.190.284	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan Perencanaan dan Evaluasi pembangunan daerah	100%	78.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan Perencanaan dan Evaluasi pembangunan daerah	100%	78.500.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.000.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	30.000.000	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	12.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	12.500.000	
1.1.4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	11.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	11.000.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.261.026.887	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.270.026.887	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	3.215.026.887	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	3.223.026.887	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	25.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	25.000.000	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	11.000.000	
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	11.000.000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Tertatanya administrasi kepegawaian, kelengkapan dan peningkatan kapasitas aparatur	100%	243.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	243.500.000	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	95 Paket	142.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	142.500.000	
1.3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	32.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	32.000.000	
1.3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	49.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	49.000.000	
1.3.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	20.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	20.000.000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	332.663.397	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	96%	320.663.397	
1.4.1	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	17.000.000	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	17.000.000	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.000.000	
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	24.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	24.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota					Kota				
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	102.663.397	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	102.663.397	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.241.309.716	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3%	169.000.000	
1.5.1	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	52.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.000.000	
1.5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.500.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	
1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	13.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13.000.000	
1.5.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	21.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	21.000.000	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	83.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	83.500.000	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	37.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	37.000.000	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	326.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93%	306.000.000	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	160.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	160.000.000	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	20.000.000	
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	15.000.000	
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	36.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	36.000.000	
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana	100%	14.891.792.064	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana	13%	2.055.114.613	
2.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	855.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	11%	100.000.000	
2.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	855.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	100.000.000	
2.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	7.641.317.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	12%	922.614.613	
2.2.1	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	1.414.000.000	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	50.000.000	
2.2.2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	20 Unit	420.860.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	6 Unit	75.000.000	
2.2.3	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	150 Orang	428.552.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang	80.000.000	
2.2.4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	300.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga	60.000.000	
2.2.5	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal	50 Orang	500.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal	45 Orang	90.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota	darurat bencana				Kota	darurat bencana			
2.2.6	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1.500.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	300.000.000	
2.2.7	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1.500.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	92.000.000	
2.2.8	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Laporan	1.000.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Laporan	86.000.000	
2.2.9	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3 Kawasan	191.469.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang	89.614.613	
2.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2.367.840.064	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	18%	433.000.000	
2.3.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Dokumen	250.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	60.000.000	
2.3.2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	342.034.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang	60.000.000	
2.3.3	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen	155.000.000	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen	60.000.000	
2.3.4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	30 Orang	169.479.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	89 Orang	68.000.000	
2.3.5	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	321.172.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	90.000.000	
2.3.6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	5 Dokumen	313.155.064	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	5.000.000	
2.3.7	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	5 Laporan	302.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	90.000.000	
2.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	4.027.635.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	14%	599.500.000	
2.4.1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	175.000.000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	30.000.000	
2.4.2	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	135.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	30.000.000	
2.4.3	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1.393.635.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	12 Dokumen	40.000.000	
2.4.4	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	540.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 Laporan	50.000.000	
2.4.5	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	10 Orang	177.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	90 Orang	88.000.000	
2.4.6	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	50 Orang	550.000.000	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	90 Orang	60.000.000	
2.4.7	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	282.500.000	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	98.000.000	
2.4.8	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	182.500.000	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	50.000.000	
2.4.9	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	110.500.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	93.500.000	
2.4.10	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	93.500.000	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	93.500.000	

Perbandingan antara rancangan awal RKPD BPBD dengan hasil analisis kebutuhan dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi dan mendukung prioritas kepala daerah.

Rancangan awal biasanya disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD dan evaluasi tahun sebelumnya. Namun, melalui analisis kebutuhan, ditemukan kondisi aktual seperti kebutuhan penguatan koordinasi antar perangkat daerah, digitalisasi pelayanan administratif, atau peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan. Proses ini penting dilakukan untuk:

- Menyesuaikan program dengan kebutuhan faktual,
- Mengoptimalkan penggunaan anggaran,
- Menyusun perencanaan yang berbasis kinerja dan data,
- Meningkatkan efisiensi dukungan terhadap fungsi strategis kepala daerah.

Dengan demikian, renja BPBD menjadi lebih responsif, akuntabel, dan selaras dengan tuntutan pelayanan pemerintahan yang dinamis.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakikatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah lainnya melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan
Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 memuat 8 (delapan) agenda prioritas Nasional, dimana pada Agenda ke- delapan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai mitigasi dampak lingkungan yaitu peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut.

Sejalan dengan ini Kabupaten Lima Puluh Kota menempatkan persoalan kebencanaan ini kedalam salah satu misi kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Misi Ke Enam Yaitu Meningkatkan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan (SAKATO KUAT).

Arah kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan adanya sinergi struktural dan operasional yang kuat untuk periode 2025-2029. BPBD Lima Puluh Kota menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran teknis yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan visi-misi daerah sebagaimana dijabarkan melalui poin-poin berikut ini:

1. Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebagai Target Bersama
   Arah kebijakan BNPB menempatkan penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 1,2% setiap tahun sebagai indikator kinerja utama nasional. BPBD Lima Puluh Kota secara langsung mengadopsi target ini ke dalam tujuannya untuk menurunkan nilai IRB kabupaten melalui intervensi menyeluruh yang mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam kebijakan pembangunan.
2. Fokus pada Pencegahan dan Kesiapsiagaan
   BNPB menekankan penguatan sistem peringatan dini multi-ancaman (MHEWS) yang terintegrasi dan pembangunan ketangguhan masyarakat. Keterkaitan ini terlihat dalam arah kebijakan BPBD Lima Puluh Kota yang memprioritaskan:
   - Peningkatan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, termasuk pemetaan risiko dan pemutakhiran sistem peringatan dini di tingkat daerah.
   - Pembangunan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan sekolah siaga bencana, yang sejalan dengan strategi nasional BNPB dalam membangun resiliensi dari tingkat komunitas.
3. Penanganan Kedaruratan yang Cepat dan Andal
   BNPB berkomitmen memperkuat kapasitas SDM dan keandalan logistik agar tanggap darurat dapat dilakukan secara profesional. BPBD Lima Puluh Kota menjabarkan arah kebijakan ini dengan:
   - Meningkatkan layanan respon cepat terhadap kejadian bencana dan penguatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC).
   - Memodernisasi infrastruktur dasar penanggulangan bencana agar lebih andal saat terjadi kedaruratan.
4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang Berkualitas

Sejalan dengan prinsip nasional "Build Back Better" dari BNPB, arah kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB fokus pada pemulihan yang efektif dan berkelanjutan. BPBD Lima Puluh Kota mengaitkan hal ini melalui kebijakan untuk meningkatkan daya lenting (resiliensi) di daerah terdampak dengan menjamin kualitas pemulihan fisik, sosial, dan ekonomi pascabencana.

5. Tata Kelola dan Akuntabilitas yang Profesional
   BNPB menargetkan perwujudan manajemen kebencanaan yang profesional dan akuntabel. Hal ini direspon oleh BPBD Lima Puluh Kota dengan menetapkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan sebagai salah satu sasaran strategisnya. Fokus ini mencakup peningkatan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan pengembangan kompetensi SDM aparatur secara berkelanjutan.
6. Kolaborasi Multi-Pihak (Pentahelix)
   Visi BNPB 2025-2029 menekankan pada penanggulangan bencana yang kolaboratif. BPBD Lima Puluh Kota menerapkan hal ini melalui strategi transformasi tata kelola dan kolaborasi multi-pihak yang melibatkan akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa untuk memperkuat sinergi kesiapsiagaan di daerah.

Secara keseluruhan, Renstra BPBD Lima Puluh Kota berfungsi sebagai instrumen untuk mensinergikan program strategis daerah dengan arah kebijakan nasional penanggulangan bencana guna mencapai ketangguhan daerah yang berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran PD adalah suatu tahapan yang penting dalam penyusunan Renstra yang menggambarkan tujuan dan sasaran jangka menengah dari PD. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam merumuskan tujuan harus mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya yaitu realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan pada RPJMD untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/PD yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD pada tahun 2025-2029 memiliki 1 (satu) Tujuan, 1 (satu) Indikator tujuan, 2 (dua) Sasaran, dan 2 (dua) Indikator Sasaran. Tujuan BPBD adalah Membangun Infrastruktur Strategis.

Adapun Sasaran Tujuan BPBD adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Perangkat

Daerah dengan Indikator Sasaran Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP); dan

- Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana dengan Indikator Sasaran Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Berikut disajikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD pada Tahun 2025-2029 pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan BPBD Pada Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Membangun Infrastruktur Strategis	Membangun Infrastruktur Strategis		Indeks Risiko Bencana Daerah	119,2	119,19 – 118,92	118,91 – 118,64	118,63 – 118,36	118,35 – 118,08	118,07 – 113,07	
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	72,15	73,15	74,15	75,15	76,15	77,15	
		Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,42	0,47	0,52	0,57	0,62	0,67	

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota yang direncanakan tahun 2027, didasarkan pada pertimbangan dari berbagai faktor-faktor, diantaranya tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, isu-isu strategis dan gambaran pelayanan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota serta pertimbangan dokumen perencanaan lainnya serta masukan dan saran dari pemangku kepentingan.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam hal penetapan program/kegiatan pada Rencana Kerja BPBD adalah terkait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029 dimana sesuai dengan fungsi dan tugas BPBD erat kaitannya dengan pencapaian misi ke-6, yaitu “Meningkatkan Infrastruktur strategis yang berkelanjutan”. Untuk menjalankan misi tersebut, BPBD membutuhkan pagu sebesar Rp. 24.458.292.064 pada Ranwal Renja yang kemudian disesuaikan menjadi Rp. 6.526.304.897. Ketidak sesuaian ketersedian pagu dengan kebutuhan, maka pada tahun 2027 program/kegiatan BPBD dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah sebesar 26%.

Ringkasan program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD pada tahun 2027 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
NO	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)

I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah. 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 3. Pelaksanaan Forum Perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. 4. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. 4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya. 2. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian. 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu. 6. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD. 7. Penyediaan bahan Logistik Kantor. 8. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD.
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 2. Pengadaan Alat Besar. 3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 5. Pengadaan sarana prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. 6. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya. 7. Pengadaan Mebel.
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik. 3. Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor.

	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar. 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
II	Program Penanggulangan Bencana	
	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana). 2. Penyusunan Kajian Risiko Bencana kabupaten/Kota.
	2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten. 2. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota. 3. Geladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 4. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam. 5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana. 6. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten. 7. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten /Kota. 8. Penyusunan Rencana Penanggulangan kedaruratan Bencana. 9. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota. 10. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana kabupaten. 11. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.
	3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas. 2. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten /Kota. 3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. 4. Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana kabupaten. 5. Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten. 6. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten. 7. Respon cepat bencana non alam Epidemi/Wabah penyakit 8. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

	4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota. 2. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota. 3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan. 4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana. 5. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan bencana Kabupaten. 6. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota. 7. Koordinasi penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota. 8. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota. 9. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana. 10. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah. 11. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana 11. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kab/Kota. 12. Penyusunan Rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten.

Untuk pendukungan prioritas pencapaian SPM terdapat sebanyak 3 program, 10 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Sebagai PD yang memiliki peran strategis dalam bidang kebencanaan, BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota secara konsisten mendukung pencapaianprogram prioritas penanggulangan bencana sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dukungan ini diwujudkan melalui perumusan dan pelaksanaan subkegiatan prioritas yang sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran daerah.

Dalam kaitannya dengan kontribusi terhadap program prioritas daerah, BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota tidak secara langsung melaksanakan subegiatan yang termasuk ke dalam sepuluh program prioritas sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029. Peran BPBD lebih difokuskan pada fungsi koordinasi, komando, serta pelaksana kegiatan pada PD teknis, sehingga program prioritas dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.Dengan demikian, BPBD tidak memiliki daftar subegiatan prioritas yang secara langsung mendukung program prioritas pembangunan daerah, sehingga pada Tabel 3.3 berikut keterangan yang dicantumkan adalah NIHIL.

Tabel 3.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD
Pendukungan Prioritas Kabupaten

No	Program Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1.	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana).	100.000.000
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana kabupaten.	92.000.000
				Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten /Kota.	300.000.000
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	89.614.613
				Geladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	86.000.000
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.	75.000.000
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten /Kota.	60.000.000
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.	60.000.000

Namun demikian, BPBD melaksanakan subkegiatan prioritas secara langsung, BPBD memiliki peran yang sangat strategis dalam Penanggulangan Bencana. Adapun mengenai uraian program dan kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan BPBD Tahun 2027 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.4 pada halaman selanjutnya.

Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPBD
Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
		Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah			48	100	100	9.566.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100	7.710.812.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.1	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
1.1.1	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Dokumen	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.1.2	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6 Laporan	6 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Laporan	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.1.3	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	12.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	13.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.1.4	1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	11.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Berita Acara	11.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.2	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
1.2.5	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		10 Orang/bulan	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	3.215.026.887,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65 Orang/bulan	3.254.893.220,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.2.6	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		9 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.2.7	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Kecamatan, Semua Kel/Desa							
1.2.8	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.3	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
1.3.9	1.05.01.2.05.0002	Pengadaaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan				95 Paket	142.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				95 Paket	142.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.3.10	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			12 Dokumen	12 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD				12 Dokumen	33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.3.11	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			9 Orang	9 Orang	49.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9 Orang	55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.3.12	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi perundang-undangan				3 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Orang	22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.4	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
1.4.13	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	17.00.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Paket	17.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.4.14	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Paket	77.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.4.15	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang disediakan		3 Paket		1 Paket	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	32.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.4.16	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.4.17	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	2 Paket	2 Paket	32.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.4.18	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Pasilitasi Kunjungan Tamu		4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.4.19	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		160 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	102.663.397,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	102.663.397,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.4.20	1.05.01.2.06.0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	13.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kel/Desa							
1.5	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
1.5.21	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan				1 Unit	450.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.5.22	1.05.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah unit alat besar yang disediakan				1 Unit	1.155.309.716,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	762.155.883,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.5.23	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah paket mebel yang disediakan				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.5.24	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	52.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	53.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.5.25	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3.500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.5.26	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	13.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.5.27	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	3 Unit	21.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.6	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
1.6.28	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	1.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.6.29	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		9 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	46.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.6.30	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	37.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	39.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.7	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
1.7.31	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit	8 Unit	8 Unit	160.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Unit	162.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.7.32	1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.7.33	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit	2 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.7.34	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	19.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.7.35	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	36.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Unit	38.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
		Persentase pemenuhan terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana			92	100	100	14.891.792.064,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100	22.337.688.096,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.8	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
2.8.36	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			100 Orang	100 Orang	855.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Orang	960.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.9	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
2.9.37	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani		20 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.414.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Kegiatan	1.415.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.9.38	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				20 Unit	420.860.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Unit	1.217.016.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.9.39	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota			150 Orang	150 Orang	428.552.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150 Orang	488.333.096,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.9.40	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			50 Keluarga	50 Keluarga	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Keluarga	320.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.9.41	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				3 Kawasan	386.436.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Kawasan	611.214.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.9.42	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				50 Orang	500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.9.43	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman			1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	2.800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			bencanaj sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun						Kecamatan, Semua Kel/Desa							
2.9.44	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	3.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.9.45	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya		9 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	2.485.432.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.9.46	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		200 Kawasan	3 Kawasan	3 Kawasan	191.469.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Kawasan	210.616.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.10	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
2.10.47	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas			12 Laporan	12 Laporan	515.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	715.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.10.48	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				12 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.10.49	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				10 Orang	342.034.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Orang	376.238.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.10.50	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal				1 Dokumen	155.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.10.51	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				30 Orang	169.479.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Orang	480.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.10.52	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		2 Orang		50 Orang	321.172.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	333.290.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.10.53	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit														
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				5 Dokumen	313.155.064,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	567.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.10.54	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				5 Laporan	302.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Laporan	354.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.11	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana														
2.11.55	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	175.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.11.56	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	145.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.11.57	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia			1 Dokumen	1 Dokumen	1.393.635.000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	1.412.999.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.11.58	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana														
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	540.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	580.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.11.59	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				10 Orang	177.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Orang	184.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.11.60	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				50 Orang	550.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	605.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.11.61	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan		100 Kegiatan		1 Kegiatan	282.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Kegiatan	390.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.11.62	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				5 Lembaga	388.000.000,00						5 Lembaga	396.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.11.63	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota														
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana				1 Laporan	182.500.000,00						1 Laporan	190.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.11.64	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	110.500.000						1 Dokumen	111.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.11.65	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			1 Dokumen	1 Dokumen	93.500.000,00						1 Dokumen	102.850.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja BPBD bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dalam penanggulangan bencana mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, penanggulangan, hingga pemulihan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun rencana kerja tahunan yang merinci langkah-langkah yang harus diambil untuk menghadapi potensi bencana di wilayahnya.

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029 dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025-2029. Adapun pencatuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lima Puluh Kota tahun 2026 dikelompokkan dalam dua urusan, yang pertama Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 7 kegiatan dan 34 sub kegiatan, dan yang kedua adalah Program Penanggulangan Bencana dengan 4 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota berikut target kinerja dan indikasi anggaran tahun 2027 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4.1
Rencana Kerja Organisasi BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**6.526.304.897,00**								**0,00**	
	1							**6.526.304.897,00**								**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.526.304.897,00**								**0,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.471.190.284,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	4.232.190.284,00							-	0,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						78.500.000,00						BPBD		0,00	
		-						78.500.000,00						BPBD		0,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	11.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	25.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	30.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	12.500.000,00							-	0,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan.	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	4 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	6 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.500.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	6 Laporan	12.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						11.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	11.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.270.026.887,00						BPBD		0,00	
		-						3.270.026.887,00						BPBD		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	25.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	11.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	11.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.223.026.887,00							-	0,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.223.026.887,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	65 Orang/bulan	3.223.026.887,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						25.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	0 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						11.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	0 Laporan	11.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						11.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	0 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						243.500.000,00						BPBD		0,00	
		-						243.500.000,00						BPBD		0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	32.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	20.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	142.500.000,00							-	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	49.000.000,00							-	0,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						142.500.000,00				-	-			0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	0 Paket	142.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						32.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	0 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						49.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	90 Orang	49.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						20.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	2 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.663.397,00						-		0,00	
		-						320.663.397,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	24.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	102.663.397,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	40.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	32.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	17.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	75.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00							-	0,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						17.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	17.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						75.000.000,00			-	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						30.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						32.000.000,00			-	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	32.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						24.000.000,00			-	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						102.663.397,00			-	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	102.663.397,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						169.000.000,00						BPBD		0,00	
		-						169.000.000,00						BPBD		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	13.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	21.000.000,00							-	0,00	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						20.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						13.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	13.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						21.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	21.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83.500.000,00						BPBD		0,00	
		-						83.500.000,00						BPBD		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	45.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	37.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.500.000,00							-	0,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						45.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						37.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	37.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						306.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						306.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-		-	-	20.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	75.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	160.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	15.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	36.000.000,00							-	0,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						160.000.000,00			-	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	2 Unit	160.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						20.000.000,00			-	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-		-	2 Unit	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00			-	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						75.000.000,00			-	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						36.000.000,00			-	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	36.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**2.055.114.613,00**								**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			-	-		-	-	1.445.114.613,00							-	0,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						100.000.000,00						Kelompok Masyarakat		0,00	
		-						100.000.000,00						Kelompok Masyarakat		0,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-		-	100 Orang	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						922.614.613,00						Kelompok Masyarakat		0,00	
		-						922.614.613,00						Kelompok Masyarakat		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	300.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	92.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-		-	-	60.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	-		-	-	86.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-		-	-	75.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	-		-	-	90.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	-	89.614.613,00							-	0,00	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-		-	-	80.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota						50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						75.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-		-	6 Unit	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						80.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-		-	100 Orang	80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						60.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-		-	100 Keluarga	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						90.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	-		-	45 Orang	90.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota						300.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						92.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	92.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						86.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	-		-	12 laporan	86.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						89.614.613,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	100 Orang	89.614.613,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						433.000.000,00						Kelompok Masyarakat		0,00	
		-						433.000.000,00						Kelompok Masyarakat		0,00	
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	-		-	-	68.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	-		-	-	60.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	-		-	-	5.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-		-	-	60.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-		-	-	90.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-		-	-	60.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	-		-	-	90.000.000,00							-	0,00	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						60.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-		-	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						60.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-		-	100 Orang	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota						60.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	-		-	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganaan keadaan darurat Kabupaten/Kota						68.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	-		-	89 Orang	68.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						90.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-		-	100 Orang	90.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit						5.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						90.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	-		-	1 Laporan	90.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						599.500.000,00						Kelompok Masyarakat		0,00	
		-						599.500.000,00						Kelompok Masyarakat		0,00	
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan	-		-	-	60.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)														
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	-		-	-	40.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	-		-	-	30.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	-		-	-	30.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	60.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	93.500.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-		-	-	98.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	-		-	-	88.000.000,00							-	0,00	
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						30.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						30.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						40.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	-		-	12 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-		-	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						88.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	-		-	90 Orang	88.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota						60.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-		-	90 Orang	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						98.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-		-	1 Kegiatan	98.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota						50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota						60.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						93.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"			0,00	
		Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	-		-	1 Dokumen	93.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BPBD
		J U M L A H						**6.526.304.897,00**							**0,00**		

Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Bidang Urusan	2027			2028			Ket
		Jumlah		Total Pagu	Jumlah		Total Pagu	
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	11	65	**6.526.304.897**	11	65	30.048.500.596	
Total		11	65	**6.526.304.897**	11	65	30.048.500.596	

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota ditunjukkan melalui indikator kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029. Berdasarkan Visi, Misi, tujuan, dan sasaran RPJMD, BPBD mendukung pencapaian Misi ke-6, yaitu "Meningkatkan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan", dengan sasaran "Membangun Infrastruktur Strategis" melalui upaya peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana.

Dalam penyusunan Renja BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027, indikator yang digunakan merupakan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029. Indikator tersebut dipilih berdasarkan tingkat relevansi terhadap tujuan organisasi, kemudahan pengukuran, ketersediaan data, serta kemampuannya dalam menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana. Dengan demikian, IKU yang ditetapkan diharapkan mampu menjadi alat ukur yang efektif dalam mengarahkan pencapaian sasaran strategis BPBD sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kebencanaan kepada masyarakat.

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Resiko Bencana Daerah	Indeks	119.2	19.19-118.92	118.91-118.64	118.63-118.36	118.35-118.08	118.07-113.07

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Cakupan penyebaran Informasi dan edukasi Rawan Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penanganan tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	

BAB VI
PENUTUP

6.1 Catatan Penting

Renja BPBD disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif BPBD sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 yang mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029. Selain itu, acuan utama dalam penyusunan Renja Tahun 2027 adalah Renstra BPBD tahun 2025-2029.

Renja BPBD memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja BPBD sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf BPBD. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur BPBD, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing. Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja BPBD juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur BPBD dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja BPBD Tahun 2027 merupakan perencanaan tahunan yang bersifat operasional dan mempunyai fungsi penting dan strategis untuk menjembatani antara perencanaan pada BPBD dengan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah BPBD yang tertuang dalam Renstra BPBD yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target BPBD serta pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur BPBD secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Renja BPBD Tahun 2027 sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan PD yakni Renstra dan Renja;
3. Renja BPBD Tahun 2027 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Tahun Anggaran 2027;
4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja BPBD Tahun 2027 yang dilaksanakan secara triwulanan.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja BPBD Tahun 2027 yang telah ditetapkan akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA BPBD dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2027, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Renja BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja BPBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFNI

